

**UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN  
UTANG (STUDI KASUS TENTANG PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI PT.KERTAS  
NUSANTARA NOMOR REGISTER PERKARA 49PK/PDT.SUS/2012)**

**ABSTRAK**

Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dianggap sebagai solusi terbaik untuk menghadapi kasus kepailitan. UUKPKPU mendukungnya dengan membuat peraturan yang bisa melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam proses PKPU, mulai dari Debitor, Kreditor, hingga pihak ketiga, yaitu dengan adanya Pasal 235 ayat (1) UUKPKPU. Selain itu, kepailitan juga memiliki banyak dampak negatif dibandingkan upaya hukum PKPU. Meskipun tertulis tegas dalam pasal tersebut bahwa terhadap PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun, namun masih terjadi multitafsir diantara para penegak hukum. Penulisan hukum ini akan mengambil contoh studi kasus dari perkara kepailitan PT Kertas Nusantara dan Allied Ever Investments. PT Kertas Nusantara sebagai Debitor yang menggunakan PKPU sebagai solusi untuk menanggapi permohonan kepailitan atas perusahaannya. Majelis Hakim, baik pada *judex factie* maupun *judex juris* yang memutus perkara ini dan penasihat hukum dari Allied Ever Investments Ltd sebagai Kreditornya, berbeda pendapat mengenai penggunaan Pasal 235 ayat (1) UUKPKPU ini sebagai dasar hukum pengambilan keputusan.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah alasan mengapa upaya hukum apapun tidak dapat diajukan terhadap putusan PKPU, dan bagaimanakah upaya hukum terhadap putusan kasasi dan peninjauan kembali dalam kasus PT. Kertas Nusantara yang dinilai keliru dalam menerapkan hukum.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data sekunder yang digunakan diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang sudah diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Ketika Debitor mengajukan permohonan PKPU, berarti Debitor telah mengakui utang-utangnya kepada Kreditor. Tidak ada alasan bagi Kreditor untuk menuntut Debitor yang beritikad baik memenuhi kewajibannya, dibuktikan dengan Debitor mengajukan perjanjian perdamaian. Hal ini membedakan PKPU dan kepailitan. Dalam kepailitan, hingga dinyatakan pailit, Debitor tidak mengakui utangnya kepada Kreditor, menyebabkan para pihak akan mengambil upaya hukum apapun untuk mendapatkan kembali haknya. Allied Ever Investments sebagai Kreditor, sekaligus Pemohon Kasasi dan Peninjauan Kembali dalam kasus ini menuntut mengenai kesalahan *judex factie* dan *judex juris* dalam menerapkan hukum. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dengan Pasal 235 ayat (1) UUKPKPU juga dinilai keliru. Prosedur dalam pembahasan rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor banyak yang tidak sesuai dengan UUKPKPU. Hingga pelaksanaan perdamaianya tidak terjamin, karena PT Kertas Nusantara dinilai tidak dapat membayar utangnya dengan kondisi keuangan perusahaan seperti sekarang.

**Kata Kunci: PKPU, Kepailitan.**

**LEGAL EFFORT ON SUSPENSION OF PAYMENT VERDICT (A CASE STUDY OF THE KERTAS NUSANTARA COMPANY'S SUSPENSION OF PAYMENT VERDICT WITH TRIAL NUMBERS 49PK/PDT.SUS/2012)**

**ABSTRACT**

Suspension of Payment (SoP) considered as the best solution to deal with bankruptcy cases. Bankruptcy and SoP Code is supporting by making regulations that can protect the concerns of all parties who involved in the SoP procedures, from Debtor, Creditor, and even third parties, that is the presence of Article 235 Paragraph (1) Bankruptcy and SoP Code. Besides the SoP, bankruptcy also has many negative impacts. That Article is explicitly written that SoP verdict is unchallengeable, while there's a lot of multiple interpretations of the law enforcement. The Thesis would take a sample from bankruptcy case of The Kertas Nusantara Company againts Allied Ever Investments Ltd. The Kertas Nusantara Company as Debtors that use the SoP for solution to respond to the bankruptcy petition on their company. The Panel of Judges, either *judex factie* or *judex juris*, who deciding this cases, and the attorney of Allied Ever Investments Ltd as Creditor, they are divided on the use of Article 235 Paragraph (1) Bankruptcy and SoP Code as the legal basis for decision- making.

The problems that discussed in this research is the reasons why the SoP verdict is unchallengeable, and which legal effort on this case that rated mistaken in the applying the laws.

This research uses a normative juridical approach to specification descriptive study. Used secondary data obtained through the study of literature. The data has been obtained, and then analyzed qualitatively.

When the Debtor filed a petition of SoP, it can be interpreted that Debtor has acknowledged its debt to Creditors. There's no excuses for the Creditors to sue Debtor who have in good will, proved by Debtor filed an agreement of reconciliation in SoP. It also distinguishes between SoP and bankruptcy. In bankruptcy, until declared bankrupt, the Debtor wouldn't acknowledge the debt, it causes the parties would take any legal effort to regain their rights. In this case, Allied Ever Investments Ltd demanded the *judex factie* and *judex juris*'s error in the applying the laws. The Judges's legal consideration use Article 235 Paragraph (1) Bankruptcy and SoP Code also rated mistaken. Against the Bankruptcy and SoP Code, the procedures in the discussion of the agreement of reconciliation plan proposed by Debtor. Implementation of the agreement of reconciliation is not guaranteed, because The Kertas Nusantara Company deemed unable to pay the debts, noticed by the company's financial condition as these days.

**Password: Suspension of Payment, Bankruptcy.**